

## **Bab I** **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Thailand merupakan bagian dari Asia Tenggara yang berbatasan dengan Kamboja di sebelah tenggara, Myanmar di utara dan barat, dan Malaysia di selatan. Thailand memiliki luas sekitar 521.000 kilometer<sup>2</sup> yang terdiri dari empat wilayah geografis. Pada umumnya beriklim panas dan lembab namun bervariasi mulai dari semi tropis di sebelah utara hingga tropis di wilayah selatan serta ada tiga musim yaitu panas dari bulan Maret sampai Mei, basah dari bulan Juni sampai Oktober, kering dan relatif dingin dari bulan November sampai Februari<sup>1</sup>. Ibu kota Thailand berpusat di kota Bangkok selain itu negara ini terkenal dengan sebutan negara gajah putih, kuil (tempat ibadah), dan Monumen budaya<sup>2</sup>. Thailand menggunakan sistem pemerintahan berupa kerajaan, kerajaan Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang pertama menggunakan sistem demokrasi. Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah di jajah oleh kekuatan Eropa. Tingkat pertumbuhan di negara tersebut sangat cepat yang terjadi pada tahun 1985 dan 1995. Pertumbuhan tersebut telah menjadi kunci politik serta pemimpin ekonomi di wilayah ini. Bagaimanapun negara ini telah mengalami tidak meratanya perkembangan politik sejak 50 tahun terakhir. Thailand adalah negara monarki

konstitusional dengan Raja sebagai kepala negara. Raja di tugaskan untuk menjalankan otoritas melalui

---

<sup>1</sup> Kenzie.Mc dan baker.2015.Doing Business in Thailand.25<sup>th</sup> Floor,Abdulrahim place.bangkok

<sup>2</sup> . “country profile thailand” diakses dari [www.worldvision.com.au](http://www.worldvision.com.au) pada 28 Januari 2018 pukul 22.23

Majelis Nasional, Dewan Menteri, dan pengadilan. Dalam prakteknya Raja tidak pernah melibatkan dirinya dalam urusan politik atau menggunakan kekuataannya untuk menghak veto legislasi atau membubarkan parlemen<sup>3</sup>.

Monarki sendiri telah tercampur ke dalam sela-sela politik Thailand selama kurang lebih dua dekade . Di tahun 1932 monarki absolut di gulingkan oleh sebuah kelompok kecil terdiri dari militer dan sipil yang di pimpin oleh Phibun Songkram dan Pridi Phanomyong. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok yang berhasil merebut kekuasaan dalam kudeta militer dan mengubah dari monarki absolut ke monarki konstitusional. Ketika terjadinya kudeta militer di thailand pada saat itu di pimpin oleh Raja Prajadhipok. Tahun 1938 Phibun Songkram menjadi perdana menteri lalu di tahun berikutnya mengubah nama negara itu .Perubahan nama semula dari siam menjadi Thailand agar ‘ lebih modern’ di harapkan dari perubahan nama tersebut adalah membalikan singkat sejarah siam selama masa pemeritahan sipil di tahun 1940an<sup>4</sup>. Pada bulan juni 1946 Raja Bhumibol naik tahta setelah kematian saudaranya Raja Ananda Mahidol<sup>5</sup>. Di tahun 1950 saat Raja Bhumibol naik tahta pengaruh politik monarki masih terbatas orang kerajaan pun telah menolak tindakan penindasan yang di dilakukan oleh pemerintahan Phibun atas aktivitas

---

<sup>3</sup> M.Manikas,peter.2003.Political parties in Asia .National Democratic Institute for international Affairs .Amerika .hal 371

<sup>4</sup> Funston,John.2001.Government and politics in Southeast Asia.Institute of Southeast Asian studies.Singapore.

<sup>5</sup> Farrely,Nicholas.2013.Why democracy struggles: Thailand’s elite coup culture.Australian Journal of International Affairs.Vol. 67 hal 285.

monarki . Raja Bhumibol adalah seorang raja konstitusional di Thailand tidak seperti kebanyakan negara terjajah di Asia Tenggara, selain itu juga mempertahankan seorang raja konstitusional. Akhirnya berubah pada tahun 1957 ketika monarki menemukan sebuah kesempatan untuk mendapatkan kembali perannya dalam politik Thailand dan bekerjasama dengan militer Sarit .

Thailand mempunyai sejarah panjang terkait kudeta militer sejak tahun 1932 Negara gajah putih ini telah mengalami 19 kali kudeta sebanyak 12 diantaranya berhasil . Dengan kata lain sebanyak 12 perdana menteri dari seluruh 29 perdana menteri yang dulunya pernah menjabat berasal dari kubu militer yang ingin melancarkan aksi kudeta<sup>6</sup>. Sejak berkuasa dua tahun terakhir kubu militer bertransformasi menjadi sebuah lembaga yang paling kuat di Thailand melebihi kekuasaan Sang Raja Bhumibol Adulyadej dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami masalah pada kesehatannya . Menyadari bahwa monarki dapat memainkan peran sebagai benteng reaksi para pemimpin. Lantas kudeta mendirikan sebuah rezim monarki konstusional dengan Majelis Nasional yang ditunjuk maupun terpilih tidak langsung . Kekuatan militer monarki tersebut menjadi benteng reaksi serta kebencian kelas penguasa terhadap demokrasi yang telah menjadi ciri khas politik Thailand sejak saat itu.<sup>7</sup>.Peristiwa panjang mengenai intervensi militer dimulai sejak peristiwa tahun 1932 antara dominasi militer dan saat masa demokratis walaupun periode demokrasi lebih banyak pun tidak dapat dipisahkan dari

---

<sup>6</sup> “kudeta militer di Thailand” diakses dari [www.bbc.com](http://www.bbc.com) pada 28 januari 2018 pukul 23.06

<sup>7</sup> “kudeta dan krisis di Thailand,kaos merah harus balik melawan” diakses dari [www.militanindonesia.org](http://www.militanindonesia.org) pada 28 januari 2018 pukul 22.11)

pengaruh militer setelah perang dunia II. Ketika Thailand di kuasai oleh pasukan jepang dan bergulat dengan berbagai macam pilihan keamaan serta politik yang tidak enak untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu . Hubungan sipil dan militer yang demokratis berarti militer berada di bawah pemerintahan sipil dan terpilih secara demokratis melalui berbagai mekanisme konstitusional dan institusional. Pada 21 Maret 2014 Mahkamah Konstitusi membatalkan pemilihan umum di bulan Februari ke Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan konstitusi 2007 . Menurut konstitusi 2007 bahwa pemilihan umum dilaksanakan pada waktu yang sama di seluruh negeri . Mahkamah konstitusi memaksa Yingluck Shinawatra dan sembilan perdana menteri untuk mengundurkan diri pada 7 Mei 2014. Para menteri lainnya memilih wakil perdana menteri Niwatthamrong Boonsongpaisan sebagai perdana menteri sementara. Proses pun berlanjut pada 22 Mei 2014 menyusul krisis politik yang melanda negara gajah putih itu sekitar enam bulan belakangan. Krisis politik Thailand berawal unjuk rasa di ibukota Bangkok tahun 2013 yang menuntut perdana menteri Yingluck shinawatra mengundurkan diri. Menganggap pemerintah pimpinannya dikendalikan oleh kakak yaitu mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin shinawatra sempat mengasingkan diri setelah dirinya di gulingkan pada tahun 2006 .

Yingluck Shinawatra adalah perdana menteri wanita pertama di Thailand sekaligus adek dari mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Perdana menteri tersebut melakukan sebuah tindakan kriminal dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk membeli padi ke petani dengan jumlah besar lalu membayar mereka sekitar 50% dari harga pasar harapannya adalahnya menaikkan harga dengan menimbun gandum . Yingluck juga menjamin harga pengadaan padi untuk

petani di posisi 15.000 THB atau sekitar \$ 450 per ton. Angka 4.000 baht ini di atas angka yang ditetapkan oleh Partai Demokrat sebelumnya. Petani padi di utara Thailand merupakan pendukung Partai Pheu Thai yang memenangkan pemilihan terakhir di Tahun 2011. Pemilihan terakhir itu mengarah pada pembentukan pemerintah yang dipimpin oleh Yingluck. Proses yang dilakukan adalah membeli beras dari petani saat di gelembungkan harganya lalu menimbunnya untuk mengurangi pasokan global dan menjualnya kembali dengan level lebih tinggi. Thailand adalah pengespor beras terbesar di dunia dengan menguasai 30 persen dari pasar dan keputusan pemerintah Yingluck tersebut menyebabkan persediaan padi sebanyak 18 juta ton. Yingluck menilai pangsa pasar ini cukup besar untuk memanipulasi harga global. Pada tahun 2012 panen padi melonjak sebesar 68 persen selama 2010-2011. Akhir 2013 stok melonjak sebesar 34 persen, Thailand memegang 17,5 juta miliar beras putih. Pada waktu bersamaan ekspor mengalami penurunan sekitar 35 persen dari tahun 2011 sampai 2012 dan terendah di tahun 2013 sebesar 39 persen<sup>8</sup>. Militer Thailand yang terdiri dari angkatan darat kerajaan, angkatan laut dan angkatan udara kerajaan sudah menjadi aktor politik utama. Militer juga telah terlibat dalam menyelesaikan konflik di Thailand Selatan dari etnis Melayu. Dalam konflik Melayu tersebut adanya banyak laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh militer termasuk penyiksaan. Dengan hal tersebut militer terus-menerus aktif dan kuat sehingga memungkinkan banyaknya kekuatan yang dapat dimiliki seperti halnya politik. Serangkaian kudeta sepanjang sejarah Thailand modern telah menghasilkan suatu organisasi yang

---

<sup>8</sup> Biswas, Asit k ; Matthew J and Cecilia Tortajada. (2015, May 21). *The rice and fall of Yingluck Shinawatra*. Diambil kembali dari The diplomat : <https://thediplomat.com>

sangat kuat dan politis maka di butuhkan kontrol sipil terhadap militer dan pejabat terpilih telah terkikis seiring berjalannya waktu dikarenakan militer telah mengendalikan semuanya . Kudeta militer yang terbaru yaitu terjadi pada tahun 2014 telah menyebabkan penguatan militer<sup>9</sup>. Kudeta militer tahun 2014 terjadi pada bulan Mei yang merupakan rangkaian peristiwa politik yaitu terjadinya demonstrasi terhadap pemerintahan di bawah perdana menteri Yingluck Shinawatra sekaligus saudara dari Thaksin Shinawatra. Yingluck Shinawatra yang saat itu berusaha mencegah diadakan pemilihan ulang di bulan Februari 2014 . Lalu pada 7 Mei 2014 mahkamah konstitusi memaksa perdana menteri Yingluck Shinawatra dan sembilan perdana menteri lainnya untuk mengundurkan diri <sup>10</sup>. Dewan Nasional Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) yang di pimpin oleh Prayuth Chan-ocha memiliki kekuasaan untuk membangkitkan kembali kediktatoran militer pada tahun 1950an-1970an berupa siklus lama kudeta , konstitusi , pemilihan dan krisis muncul kembali <sup>11</sup> . Dewan Nasional Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) di bentuk karena menyusul adanya krisis politik yang melanda negara Thailand sekitar enam bulan belakangan ini . Krisis politik tersebut berawal dari unjuk rasa di ibukota bangkok pada tahun 2013 yang menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawarta mengundurkan diri selain itu militer dengan alasan ingin mengambil alih kekuasaan untuk ‘memulihkan ketertiban’.Dewan Perdamaian dan Ketertiban Nasional (NCPO) di pimpin oleh Jenderal Prayuth Chan-ocha.

---

<sup>9</sup> Chen,Michael.2016.Country Report: Thailand

<sup>10</sup> “ kudeta militer di Thailand” diakses dari [www.bbc.com](http://www.bbc.com) pada 28 januari 2018 pukul 23.06

<sup>11</sup> Asia Report N<sup>o</sup>274.2015.Thailand’s Lengthening Roadmap to Election.Bangkok.hal 1

## **B.Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas , maka dapat di susun rumusan masalah sebagai berikut :

***Mengapa militer berhasil menguasai perpolitikan pasca penggulingan Yingluck Shinawatra di thailand?***

## **C.Kerangka Teori**

Dalam ***Pengaruh Militer terhadap kekuasaan politik pasca penggulingan Yingluck Shinawatra di Thailand Tahun 2014-2018*** , Kerangka teori yang digunakan untuk membahas masalah ini adalah **Konsep pretorianisme**

### **Konsep Pretorianisme**

Pada awalnya pemikiran teoritis dari *Amos Perlmutter* di kembang oleh *Samuel P Huntington* yang merupakan seorang ilmuwan asal Amerika . Pada tahun 1957 pemikiran teoritis tersebut dikembang dalam bukunya yang berjudul *The soldier and the state* dan inti pandangan tersebut adalah berubahnya korps perwira militer dari bentuk “penakluk” menjadi kelompok profesional. Pada tahun 1789 militer profesional muncul terutama di Negara Eropa setelah terjadinya revolusi Perancis . Pemikiran *Amos Perlmutter* tidak hanya dikemukakan oleh Huntington saja namun jauh sebelumnya ada seorang ilmuwan asal Perancis *De Tocqueville* yang berbicara mengenai “profesi militer”. Sebelum tahun 1945 militer mempunyai peran aktif di dalam dunia politik yang dianggap sebagai gejala unik pasca perang dunia II. Pada abad kesembilan belas dan abad kedua puluh intervensi terhadap politik oleh tentara banyak terjadi di beberapa negara. Kuatnya fakta sejarah dan politik membuktikan bahwa pemerintah sipil tidak efektif dan tidak berlembaga. dibawah kondisi pretorian , Banyak

kombinasi antara sipil dan militer yang akan terjadi mengakibatkan tentara dapat mengambil alih pemerintahan baik atau tidak melalui persetujuan politisi sipil. Menurut *Frederick Mundel Watkins's* dalam buku berjudul *Eyclopedia Of The Social Science* pada tahun 1933, Pretorianisme merupakan suatu kata yang sering digunakan untuk menjelaskan situasi dimana militer berada dalam masyarakat tertentu guna melaksanakan kekuasaan politik. Pretorianisme itu sendiri di bagi menjadi dua yaitu pretorianisme historis dan modern.

### **A.Pretorianisme Historis**

Pengawal Pretorian Romawi ( Protoripe Pretorianisme Historis) adalah sebuah pasukan kecil tentara yang terdapat di ibu kota kerajaan untuk melayani keabsahan dengan membela senat tentara . Pengawal Pretorian mempunyai pengaruh yang berdasarkan pada tiga faktor antara lain monopoli atas kekuatan militer, tidak adanya peraturan mengenai suksesi yang definitif dan prestise senat Romawi. Meskipun tidak mempunyai aturan yang tetap dan keras mengenai cara pemilihann para pemimpin pertama atau Raja. Menurut teori Weber, Pretorianisme sebagai dominasi honoratiores (orang terhormat).ini adalah suatu kekuasaan yang diterapkan pada kelompok manorial (ksatria) atau kelompok patrimonial<sup>12</sup>. Di negara jajahan bekas bangsa Eropa selama abad kesembilan belas dan abad keduapuluh tentara secara spesifik berorientasi pada penaklukan serta di dominasi oleh negara asing yang mana merupakan suatu jabatan ideal dalam organisasi.

---

<sup>12</sup> Patrimonial adalah suatu unit yang lebih maju dari rumahtangga patriarch(sistem menurut keturunan bapak /keluarga)yang merupakan unit yang relatif kecil yang berdasarkan ikatan darah .

## **B.Pretorianisme Modern**

Di Negara terbelakang fungsi tentara hampir sama dengan yang sedang berlaku di negara patrimonial dan bertindak sebagai pusat kekacauan politik, ambisi politik dan ancaman terhadap kekuasaan . Negara Pretorian modern adalah suatu negara dimana berkembang dengan adanya kecenderungan campur tangan dalam pemerintahan dan memiliki potensi untuk mendominasi badan eksekutif . Negara pretorian memiliki ciri terpenting yaitu adanya badan eksekutif yang tidak efektif dan pembusukan pada bidang politik . Proses politik di negara pretorian menguntungkan bagi tentara sebagai kelompok inti serta mendorong peningkatan segala harapan suatu kelas yang memerintah. Selain itu perwira militer yang masuk kedalam politik mereka mempunyai sifat politisi dan lama-kelamaan kehilangan kekuasaan atas tantara dan kehadiran mereka dalam masalah sipil merupakan petunjuk akan adanya wabah korupsi. Kepemimpinan politik dalam negei pretorian modern berasal dari tentara maupun kelompok yang bersimpati. Perubahan konstitusi di capai serta di pelihara oleh tentara dan tentaralah yang memainkan peranan didalam lembaga politik<sup>13</sup>.

Ada tiga tipe perwira pretorian yang di klasifikasikan antara lain :

### **1. Moderator Pretorian.**

Dimana pretorian menggunakan hak vetonya untuk suatu keputusan dari pemerintah dan politik tanpa menguasai meskipun pihak sipil yang memerintah dan kekuasaan mereka di awasi oleh militer .

---

<sup>13</sup> . Perlmutter, Amos.1977.Militer dan Politik.Yale university press.london.hal 141-150

Moderate juga tidak bertindak sebagai kelompok yang mempunyai pengaruh dan terlibat dalam politik.

2. Pengawal Pretorian .

Setelah pengawal pretorian menggulingkan pemerintahan sipil maka mereka akan memegang pada periode dua hingga empat tahun . Berhubungan dengan tujuan pemerintahaya tidak berbeda dengan moderator pretorian yang ingin menghalangi perubahan politik dan mempertahankan peraturannya . Semua jenis pengawal pretorian hanya untuk mempertahankan status quo .

3. Pemerintah Pretorian

Tipe ini jarang diterima apabila dibanding dengan moderator dan pengawal pretorian dikarenakan adanya campur tangan militer . Apabila dibandingkan dengan tipe moderator serta pengawal , maka penguasa pretorian tidak saja menguasai pemerintah namun mendominasi rezim tersebut . Bentuk pemerintahan pretorian dimaksudkan untuk mengadakan perubahan dasar melalui cara menghapuskan hampir semua organisasi politik .

Selain itu terdapat kondisi sosial yang mendukung pretorian di Negara berkembang yaitu :

1. Lemahnya kohesi sosial
2. Keberadaan kelas sosial

3. Polaritas sosial dan kelas menengah yang tidak terkonsolidasi<sup>14</sup> .

Didalam praetorian terbukti bahwa lemahnya lembaga politik disebabkan karena berada dibawah kekuasaan kekuatan sosial yang tidak tertata dan kuat . Menurut Huntington rezim praetorian mempertimbangkan dua jalan politik utama guna menuju pembangunan institusi . Pertama militer sebagai agen utama dari proses perlembagaan dan kedua bergantung pada adanya keterampilan organisasi politik. Dalam konteks praetorian yang dicirikan oleh politisasi secara umum adalah munculnya militer sebagai satu-satunya kekuatan depolitisasi netral<sup>15</sup> . Praetorianisme terjadi pada saat pemerintah sipil berhenti saat mengejar tujuan nasionalis dan modernis. Pada umumnya praetorianisme terkait dengan disintegrasi orde lama. Hubungan otoritas antara pembentukan militer dan tatanan politik didasarkan pada orientasi tradisional Dalam praetorianisme modern hubungan otoritas berdasarkan orientasi rasional hukum<sup>16</sup> .

---

<sup>14</sup> . Ginting, Dra.Junita Setiana.2003.Pretorian dalam perkembangan politik Negara berkembang .Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara . hal 3-6

<sup>15</sup> . Khan , Samsul .2009. The Military and the Praetorian Regimes in Pakistan Politics : Political Usurpers or Protectors of an Incipient Democracy?.Universitas of South Australia.Australia

<sup>16</sup> . Perlmutter,Amos.1969.The Praetorian State and the Praetorian Army :Toward a Taxonomy of Civil Military Relations in Developing Polities.Program in Political science University of New York .

Menurut buku Amos Perlmutter yang berjudul *The Praetorian State* di tahun 1974. Dalam studi seminarnya, Perlmutter menyoroti keunggulan utama suatu negara Praetorian sebagai mana :

*Militer mempunyai potensi yang mendominasi sistem politik dalam prosesnya juga mendukung adanya suatu pengembangan terhadap tentara sebagai kelompok inti sekaligus kelas berkuasa. Tentara ikut campur dalam urusan pemerintahan sekaligus mempengaruhi serta mempertahankan ketentuan dari konstitusional tertentu* <sup>17</sup>.

Begitu pula yang terjadi di Thailand dimana pemerintahan sebelum Raja Prajadhikok bersifat monarki absolut dan pada tahun 1932 monarki absolut di gulingkan lalu berubah menjadi monarki konstitusional . Penggulingan tersebut di lakukan oleh kelompok kecil yang terdiri dari sipil dan militer yang di pimpin oleh Phibun songkram dan Pridi pranomyong yang berhasil merebut kekuasaan lalu di ubahnya menjadi monarki konstitusional pada masa Raja Prajadhikok . Tahun 1950 saat Raja Bhumibol naik tahta bahwa pengaruh politik sangat terbatas sehingga kerajaan pun menolak terhadap penindasan yang di lakukan oleh Pribun . Thailand sendiri mempunyai sejarah panjang kudeta militer sejak tahun 1932 tersebut negara gajah putih itu mengalami kudeta sebanyak 19 kali dan sebanyak 12 di antaranya berhasil . tepatnya pada tahun 2006 politik thailand sempat mengalami kekacauan dimana militer telah melakukan kudeta sebanyak 2 kali dan membatalkan 2

---

<sup>17</sup>. El Shimy ,Yasser.2016. *A Model of Praetorian State* . Belfer center for science and international affairs.Cambridge.

konstitusi yang mana raja telah menyetujui hal itu dan militer juga menggulingkan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Dalam kekuasaan militer monarki sebagai benteng reaksi serta kebencian terhadap kelas penguasa terhadap demokrasi yang sudah menjadi ciri khas politik Thailand . Hubungan sipil dan militer yang demokratis berarti militer berada di bawah pemerintah sipil yang di pilih secara demokratis melalui berbagai mekanisme konstitusional dan institusional .

#### **D. Hipotesa**

Militer berhasil menguasai perpolitikan di karenakan :

1. Lemahnya kekuatan sipil mengundang masuknya militer kedalam politik Thailand.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan mengenai politik di negara Thailand dibawah  
Kekuasaan militer
2. Menjelaskan seberapa militer berhasil menguasai perpolitikan di negara Thailand
3. Menjelaskan mengenai korupsi di Thailand

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan ,dan juga untuk membantu pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah ditentukan .lebih jauh lagi, pembahasan

dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari yang telah ditetapkan .

Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi kajian pada ***Pengaruh Militer terhadap politik kekuasaan pasca penggulingan Yingluck Shinawatra di Thailand***, Jadi batas penelitian yang dilakukan peneliti hanya sebatas analisis ***pasca penggulingan Yingluck Shinawatra*** .

## **G.Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini tersusun atas lima bab yang sistematikanya sebagai berikut :

- BAB I Merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, Kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian , jangkuan penelitian dan sistematika .
- BAB II Membahas tentang sejarah singkat politik pada tahun 1932 (awal terjadinya kudeta ) ,Partai politik dan kekuatan militer dalam politik ,
- BAB III Membahas tentang Awal terpilihnya sebagai Perdana Menteri hingga masa pemerintahan dari tahun 2011, terjadinya kudeta dan pasca terjadinya kudeta .
- BAB IV Membahas mengenai Lemahnya kekuatan sipil
- BAB V Kesimpulan dan penutup